

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Hal ini mengakibatkan pembangunan kurang merata di berbagai daerah (Lutfitasari & Mulyani, 2022). Upaya untuk menyamaratakan pembangunan di daerah-daerah Indonesia adalah dengan membangun desa (Lutfitasari & Mulyani, 2022). Tujuan diupayakan penyamarataan pembangunan agar masyarakat desa dapat produktif dan dapat menjadi sarana dan prasarana untuk menunjang perekonomian desa untuk menjadi desa yang mandiri dan memperkuat kelembagaan desa. Desa merupakan unit satuan terkecil di Indonesia dapat memberikan manfaat yang besar untuk Indonesia. Hal ini juga memunculkan gagasan pemerintah untuk membangun perekonomian desa menjadi lebih baik yaitu dengan mendirikan Badan Milik Usaha Milik Desa (Sofyani et al., 2019).

Pembentukan BUMDes tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun pada pelaksanaan mekanisme pembentukan dan operasionalisasi BUMDes baru ada pada tahun 2010 yang dijelaskan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik

Desa. Pada tahun 2015 kemudian diperbaharui lagi dengan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Nugraha, 2019)

BUMDes lahir sebagai pendekatan baru yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan potensi desa. BUMDes dikelola oleh desa, sehingga berprinsip untuk desa, dari desa, dan oleh desa. BUMDes bekerja untuk mewadahi masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa dan kelembagaan desa (Sofyani et al., 2019). Tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perekonomian dan pendapatan di desa, serta meningkatkan potensi desa dari segi sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan masyarakat di desa dan berfungsi sebagai tulang punggung pemerataan pertumbuhan ekonomi desa (Setiawan & Bharata, 2022). Pembentukan BUMDes untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusia. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa untuk meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah (Widiastuti. Y, 2019).

Selain bertujuan untuk mewadahi masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desanya, BUMDes dapat diartikan lembaga ekonomi alternatif untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan

sosial masyarakat desa (Nuraini, 2020). Idealnya BUMDes berfokus pada keuntungan dalam menggerakkan perekonomian desa dengan memanfaatkan setiap potensi yang ada di desa (Nuraini, 2020). Pemberdayaan desa melalui BUMDes penting dilakukan karena dapat menciptakan keunggulan kompetitif, kolaboratif, dan adaptif, menuju kesejahteraan desa yang berkelanjutan dengan masyarakat terlibat di dalamnya (Muryanti, 2020).

Saat ini, kinerja industri telah bergeser dari kinerja ekonomi sentris ke kinerja keberlanjutan. Dalam panduan IPSASB (2013) jangka Panjang keberlanjutan didefinisikan sebagai “kemampuan suatu entitas untuk memenuhi pemberian layanan dan komitmen keuangan baik sekarang dan di masa depan” dan mengakui tiga dimensi yang saling terkait: (1) layanan, (2) pendapatan, dan (3) utang. Dari perspektif lain, keberlanjutan adalah sinyal bagi pemangku kepentingan bahwa organisasi melakukan pekerjaan mereka dengan benar dengan menjaga keseimbangan antara biaya dan pendapatan (Cohen & Malkogianni, 2021). Istilah keberlanjutan diusulkan oleh Elkington (1994) didefinisikan sebagai perluasan perspektif organisasi yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Saat ini banyak Organisasi yang mengikuti tujuan keberlanjutan dengan memasukkan inisiatif hijau dalam praktik bisnis mereka (Abdul-Rashid et al., 2017). Penanganan masalah lingkungan dianggap sebagai tantangan utama di organisasi

mana pun, karena tindakan organisasi yang tidak berkelanjutan berkontribusi pada penipisan dan kerusakan sumber daya alam.

Secara umum, konsep integral dari keberlanjutan mengacu pada keterkaitan antara masyarakat, lingkungan, dan ekonomi (Hutchins & Sutherland, 2008). Konsep ini juga menyimpulkan bahwa organisasi sosial bertanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan. Hutchins & Sutherland, (2008) menjelaskan bahwa keberlanjutan untuk organisasi sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk terus melayani masyarakat dan pemangku kepentingan dan sebagai imbalannya, memiliki kepercayaan pada kemampuan organisasi untuk memenuhi komitmennya. Dalam perspektif bisnis, keberlanjutan mengacu pada berbagai cara untuk menanggapi perubahan tertentu, termasuk pertumbuhan populasi manusia dan perkembangan pesat dalam ekonomi (Ab Samad et al., 2017).

Keberlanjutan dalam organisasi merupakan langkah penting yang dapat dicapai dalam keberlanjutan organisasi. Para pemangku kepentingan lainnya semakin memperluas dalam menyusun praktik pelaporan keberlanjutan. Keterkaitan pada transparansi yang lebih besar dan akuntabilitas pada pelaporan keberlanjutan dapat mendorong kepercayaan dan membantu pasar berfungsi lebih efisien dalam mendorong kemajuan organisasi, keberlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi (Rohman, 2019).

Indonesia sebagai negara berkembang dengan kepulauan terbesar di dunia memiliki lingkungan geografis dan sosial yang sangat bervariasi dan kompleks, hal ini menjadi faktor timbulnya sejumlah masalah seperti kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan alam, dan kebutuhan akan investasi langsung luar negeri (Djajadikerta & Trireksani, 2012). McAdam & Leonard, (2003) mengatakan bahwa keadaan yang demikian seharusnya dapat menjadi pemicu organisasi untuk mulai mengungkapkan kinerja keberlanjutan (*Sustainability Performance*). Pengungkapan tersebut terutama ditujukan kepada organisasi yang secara langsung memanfaatkan sumber daya alam bagi organisasi yang membutuhkan tambahan modal karena dalam ekonomi global perusahaan tidak hanya dituntut untuk memaksimalkan laba semata

Barbosa et al., (2022) mengatakan untuk mendorong organisasi menuju kinerja berkelanjutan organisasi perlu mempertimbangkan dan menyeimbangkan tiga aspek keberlanjutan yaitu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Organisasi tidak dapat mencapai kinerja keberlanjutan sendiri. Oleh karena itu, kerja sama sangat penting untuk keberlanjutan. Dengan demikian, mitra rantai bisnis juga perlu mematuhi inisiatif berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara mitra rantai pasokan dalam inisiatif keberlanjutan merupakan pendorong penting kinerja berkelanjutan. Kinerja keberlanjutan organisasi dapat didefinisikan sebagai

kemampuan bisnis untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan langsung dan tidak langsung tanpa merugikan kebutuhan pemangku kepentingan di masa depan (Dyllick & Hockerts, 2002). Ini mendefinisikan proses transformasi model bisnis organisasi untuk menyeimbangkan kekhawatiran tentang tiga pilar keberlanjutan ketika memperluas operasi jangka panjang (Zheng et al., 2021).

Organisasi dengan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi yang konsisten dapat dikatakan mampu untuk mencapai pengurangan biaya, menurunkan litigasi, risiko peraturan, meningkatkan efisiensi operasional, dan interaksi komunitas keuangan dan pemangku kepentingan yang lebih stabil (Bui et al., 2020). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kinerja keberlanjutan mencakup tiga komponen keberlanjutan yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi dan didefinisikan sebagai pencapaian kesejahteraan oleh suatu entitas, dengan kekhawatiran entitas masa depan dapat berjangka Panjang (Zheng et al., 2021).

Ketiga aspek tersebut berinteraksi, tumpang tindih, dan terkadang bertentangan. Misalnya, BUMDes ingin melakukan investasi tambahan yang dibutuhkan untuk unit usahanya yang lebih ramah lingkungan, keberlanjutan ekonomi dapat menderita sebagai akibat dari kelestarian lingkungan. Namun, untuk mengejar semuanya, organisasi harus bertindak secara holistik. Ketika sebuah

organisasi tidak mendukung salah satu aspek ini, mereka tidak bertindak secara berkelanjutan (Evans et al., 2017). Setiap aspek menunjukkan prasyarat yang diperlukan. Organisasi berjuang untuk mengatasi *Triple Bottom Line* bahkan jika mereka sebagai besar berhasil menciptakan sinergi antara komponen lingkungan dan ekonomi (Braccini & Margherita, 2019).

Kinerja keberlanjutan menunjukkan kemampuan suatu organisasi untuk tetap eksis dari waktu ke waktu, ini bertujuan untuk melindungi organisasi, lingkungan, dan kehidupan sosial bagi para stakeholder dan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa harus memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan ini akan muncul karena adanya pembaharuan dan pengembangan pesaingnya (Junita et al., 2020). Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana praktik organisasi kecil seperti BUMDes dapat mengaplikasikan kinerja keberlanjutan.

Penelitian ini menggunakan *social enterprise theory* dan *adaptive theory*. Dari teori tersebut dapat ditelaah bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki karakteristik yang masuk dalam kategori *social enterprise*. BUMDes sebagai organisasi sosial lebih bertujuan untuk mencapai misi sosial tetapi di sisi lain tetap menjalankan bisnis yang mengikuti mekanisme pasar. *Social enterprise* disebut sebagai organisasi hybrid, yang dapat diartikan

bahwa proses bisnisnya memiliki karakteristik baik dalam bidang bisnis maupun sosial dalam hal kehadirannya harus mampu mengatasi permasalahan sosial yang ada di tingkat desa (Widiastuti et al., 2019). Namun, di sisi lain, BUMDes juga menjalankan bisnis yang bertujuan agar BUMDes mampu mempertahankan kemampuan adaptifnya yaitu dengan memanfaatkan peluang pasar dan teknologi yang sedang berkembang untuk memajukan dan menerapkan ide-ide inovatif baru (Kurnianto & Iswanu, 2021).

Merujuk kepada kitab suci Al-Quran, Islam sudah mengajarkan kepada umat manusia bahwa kinerja harus dinilai. Ayat yang menjadi rujukan penilaian kinerja itu adalah Surat At-Tawbah ayat 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَيْهِ الْعَلِيْمِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan, katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka, Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. Berdasarkan surat ini maka sebaiknya kita sebagai umat Islam harus melakukan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab karena kinerja yang akan kita hasilkan tidak hanya akan dinilai oleh sesama manusia akan tetapi kepada Tuhan.

Permasalahan – permasalahan yang sering terjadi di BUMDes adalah permasalahan yang sering terjadi di BUMDes manapun seperti misalnya kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat BUMDes seringkali kesulitan mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam hal modal, pelatihan, dan pengembangan bisnis (Sadesa, 2023). Hal inilah yang mendasari bahwa BUMDes membutuhkan *sustainability performance* untuk mengembangkan BUMDes lebih memiliki masa depan.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Artin, (2022) juga membuktikan bahwa penerapan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan pasar yang ada atau menciptakan pasar baru. Kurniawan, (2018) menyatakan bahwa *sustainability reporting* memiliki peran penting dalam bisnis internal BUMDes dan UKM. Junita et al., (2020) menjelaskan bahwa proses manufaktur yang berkelanjutan memiliki dampak yang signifikan terhadap semua elemen keberlanjutan (kinerja lingkungan, kinerja ekonomi, dan kinerja sosial). Namun dalam penelitian Parisa (2022) menjelaskan bahwa aspek lingkungan berdampak negatif terhadap praktik berkelanjutan, hal ini dikarenakan pemilik atau pengelola UKM biasanya mengabaikan dampak lingkungan yang disumbangkan oleh UKM.

Penelitian ini akan membahas tentang **Potret badan usaha milik desa (BUMDes) dalam mengimplementasi *Sustainability***

Performance. Jadi berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Artin, (2022) pada penelitiannya sampel yang digunakan adalah UKM sedangkan di dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana BUMDes memiliki karakteristik yang berbeda dengan UKM (Artin, 2022). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipilih sebagai sampel penelitian karena pemerintah telah mencanangkan program membangun dari desa salah satunya adalah mendirikan BUMDes. Pendirian BUMDes menjadi isu menarik karena perkembangannya begitu pesat, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi perspektif pemberdayaan. Keberlanjutan BUMdes menjadikan perhatian berbagai pihak terlebih adanya pandemi Covid-19. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi sejauh mana potret Badan Usaha Milik Desa dalam mengimplementasikan *sustainability performance*.

Dalam penelitian ini hal yang menarik adalah terkait masalah apakah BUMDes telah menerapkan *sustainability performance*, selain itu hal menarik lainnya adalah aspek yang penulis gunakan seperti aspek ekonomi, sosial, lingkungan dapat membuktikan bahwa aspek tersebut penting untuk dapat menggambarkan *sustainability performance* pada BUMDes. Konsep keberlanjutan memiliki pengertian bahwa semua kegiatan bisnis tidak hanya memikirkan pemangku kepentingan di organisasi, tetapi juga

memikirkan dampak organisasi terhadap pemangku kepentingan di luar organisasi (Kurniawan, 2018). Oleh karena itu mengapa *sustainability performance* menarik karena hal itu menunjukkan upaya dan pencapaian organisasi terkait keberlanjutan, menjadi perhatian penting bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Medel et al., (2011) berpendapat bahwa keberlanjutan organisasi membantu organisasi menciptakan nilai konsumen dan karyawan berjangka panjang dan mempertimbangkan bagaimana bisnis beroperasi dalam konteks sosial dan lingkungan. Selain itu, organisasi yang berkelanjutan mampu menarik dan mempertahankan karyawan karena mengadopsi layanan dan kegiatan yang tidak merugikan karyawan dan Kesehatan masyarakat (Artin, 2022).

Dalam penelitian ini akan dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini dipilih karena banyaknya BUMDes yang sudah maju di Provinsi ini dan banyak menjadi panutan bagaimana BUMDes di Indonesia dikelola (Sofyani et al., 2019). Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencakup Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Semua daerah tersebut cukup terkenal pengelolaan BUMDesnya dalam sumber daya alam, industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal, jaringan distribusi, sektor keuangan dan pelayanan publik.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apa saja aspek kinerja keberlanjutan yang sudah diterapkan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
2. Bagaimana implementasi kinerja keberlanjutan yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
3. Apa manfaat dari penerapan kinerja keberlanjutan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?

1.3. Tujuan Masalah Penelitian

1. Untuk menjelaskan aspek kinerja keberlanjutan yang sudah diterapkan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Untuk menginvestigasi implementasi kinerja keberlanjutan yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. Untuk menginvestigasi manfaat penerapan kinerja keberlanjutan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat berimplikasi pada bidang akademik dan praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik

yang terkait dengan *sustainability performance* di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi literatur dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai *sustainability performance* di BUMDes.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menganalisis apakah BUMDes tersebut sudah sustainable atau berkelanjutan.